

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN BANTUAN PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI UPAYA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN SUKOLILO
KOTA SURABAYA**

Maria Celsi Mbadhi Mali

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Chelseamali21@gmail.com

Achluddin Ibnu Rochim

Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
didin@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk kegiatan Dinas Sosial dalam pelaksanaan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), untuk mengetahui hambatan pemerintah melaksanakan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan untuk mengetahui solusi pemerintah dalam melaksanakan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan mengumpulkan data lapangan dengan menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, peran Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya berjalan sesuai dengan tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat yang sangat miskin dengan memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang miskin. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengalami beberapa hambatan dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan diantaranya adalah pendataan kependudukan masyarakat miskin yang tidak lengkap sehingga menjadi kendala bagi pihak PKH dalam meratakan pemberian penerima bantuan PKH, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan (PKH).

Kata Kunci: Peran Dinas Sosial, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan persoalan yang hingga saat ini belum teratasi. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa presentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen. Jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang. Pada tahun 2020 angka kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan menjadi 27,55 atau meningkat menjadi 27,76 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang juga diakibatkan oleh dampak Covid-9. Hal ini menjadikan kemiskinan sebagai salah satu masalah sosial yang perlu diperhatikan lebih oleh Pemerintah.

Kota Surabaya merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang menjadi agenda serius yang sedang dihadapi dan ditanggulangi oleh wilayah perkotaan di kota Surabaya. Berdasarkan data Badan pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin di Surabaya tercatat sebanyak 130,55 KK dan mengalami kenaikan 0,89% pada tahun 2020. Badan pusat statistik menyebutkan jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, Kecamatan Sukolilo merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Kota Surabaya pada 22 Juni 2020. Jumlah kartu keluarga di Kecamatan Sukolilo berjumlah 116.893 kk, keluarga miskin berjumlah 1.861 kk.

Kemiskinan terjadi karena beberapa factor diantaranya tingkat pendidikan yang rendah, sikap malas bekerja, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan kerja dan keterbatasan modal. Selain factor tersebut, kemiskinan juga dipengaruhi oleh kebijakan public yang belum berpihak kepada masyarakat miskin, tidak tersedianya pelayanan sosial dasar, kesenjangan, dan ketidakadilan. Dalam Undang – Undang Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 29 huruf C menegaskan bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota yaitu memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Namun berdasarkan fakta di lapangan, penyaluran bantuan tersebut tidak efektif.

Bukti : berita yang dimuat oleh liputan6.com, menyebutkan bahwa pemerintah kota Surabaya menerima berbagai laporan terkait pengaduan bantuan sosial yang menyebutkan bahwa bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, dimana masyarakat yang dikategorikan miskin tidak menerima bantuan apapun, justru sebaliknya yang menerima bantuan tersebut. Program Keluarga Harapan merupakan program dari pemerintah yang pelaksanaannya pun masih belum melalui proses dan tahapan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan evaluasi. Selain manajemen yang baik, peran Dinas Sosial sangat perlu diperhatikan dalam program ini, karena melalui peran ini dapat diketahui seberapa tolak ukur pencapaian program.

Salah satu program bantuan ini ialah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di Kecamatan Sukolilo. Program Keluarga Harapan ini merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan persyaratan tertentu. Tujuan dari program ini adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Secara

khusus, tujuan PKH terdiri atas : Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yang dipakai adalah tipe deskriptif.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian akan fokus memahami dan mengetahui mengenai masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Sehingga peneliti memfokuskan penelitian ini pada peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan guna menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif sehingga mempermudah peneliti melakukan penelitian. Adapun lokasi pelaksanaan penelitian adalah di kantor Kecamatan Sukolilo kota Surabaya.

Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (field research) dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangkanketerangan. Wawancara yang dipilih adalah wawancara bebas terpimpin, metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan responden.
- b. Data Sekunder, terdiri dari :
 1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum.
 2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, jurnal hukum, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.
 3. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kegiatan Dinas Sosial Dalam penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH)

Dinas sosial kota Surabaya yang merupakan lembaga yang bertanggungjawab terhadap penanganan kemiskinan. Masalah sosial kemiskinan ini merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan peraturan Presiden NO. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

“Menurut saya Dinas Sosial dalam melaksanakan peranannya mengacu pada Peraturan Presiden No 15. 2010 BAB III Pasal 3 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha Mikro dan Kecil, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.” (Wawancara dengan Bapak Edy Susanto, ST sebagai Pananganan Fakir Miskin di Dinas Sosial. Jumad, 18 Juni 2021).

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah melakukan banyak usaha untuk menekan angka kemiskinan diantaranya diadakannya berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, program tersebut yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), didalam PKH ini terdiri dari 3 aspek yaitu PKH bagi pemberi pelayanan kesehatan, PKH bagi pemberi pendidikan, dan PKH bagi pemberi kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan ini diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM).

1. PKH (Program Keluarga Harapan) bagi pemberi pelayanan kesehatan Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Dinar Fitria Sari mengatakan bahwa:

“Yang mendapatkan PKH kesehatan yaitu rumah tangga sangat miskin (RTSM) ditetapkan sebagai calon peserta PKH dan akan menerima bantuan komponen kesehatan jika pendataan ditemukan anggota keluarga yang terdiri dari :

- a. Ibu Hamil
 - b. Ibu nifas
 - c. Anak usia 0-6 tahun
2. PKH (Program Keluarga Harapan) bagi pemberi pelayanan pendidikan

Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar, khususnya bagi

anak-anak dari Rumah Tangga Sangat Miskin, serta untuk mengurangi angka pekerja anak.

Persyaratan yang ditetapkan untuk komponen pendidikan dalam PKH adalah mendaftarkan peserta didik dan memenuhi jumlah kehadiran yang ditetapkan dalam program. Melalui persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar diharapkan PKH akan meningkatkan partisipasi pendidikan dan hal lain mendukung kebijakan pemerintah Indonesia tentang program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun.

Menurut Ibu Dinar Fitriani, "untuk mendapatkan bantuan PKH Pendidikan ini, ada sasaran dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut, yaitu:

Persyaratan Peserta PKH Pendidikan

sasaran	Persyaratan
Usia 6-21 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD,SMP,SMA)	1. Teraftar di sekolah/pendidikan 2. Minimal 85% kehadiran di kelas

3. PKH (Program Keluarga Harapan) bagi pemberi pelayanan kesejahteraan sosial

Komponen kesejahteraan sosial dibagi menjadi 2 yaitu disabilitas berat dan lansia 60 tahun ke atas.

a. Disabilitas Berat

Pihak keluarga atau pengurus melayani, merawat, dan memastikan pemeriksaan kesehatan bagi penyandang disabilitas berat minimal 1 tahun sekali dengan menggunakan

1. Layanan home visit (tenaga kesehatan datang ke rumah (Keluarga Penerima Manfaat) KPM penyandang disabilitas berat)
2. Layanan home care (pengurus memandikan, mengurus, dan merawat KPM PKH)

b. Lansia 60 Tahun ke atas

1. Memastikan pemeriksaan kesehatan
2. Serta penggunaan layanan puskesmas santun lanjut usia
3. Layanan home care (pengurus merawat, memandikan, dan mengurus KPM lanjut usia)
4. Day care (mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal, lari pagi, senam sehat, dan lain sebagainya) bagi lanjut usia tersebut minimal 1 tahun sekali.

Faktor Penghambat dan Pendukung Pemerintah Dalam Pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan)

Watak dan sikap yang kurang tanggung jawab dari peserta PKH atas informasi yang diberikan oleh pendamping PKH. Akibatnya menyebabkan tidak tepatnya waktu penyerahan syarat dan ketentuan dari peserta PKH, sehingga pencairan dana kerekening peserta PKH tidak tepat waktu.

Data di lapangan masih ditemukan adanya data peserta PKH yang tidak akurat, dimana penerima PKH tersebut tidak memenuhi kriteria yang berlaku, namun terdaftar pada data sebagai peserta PKH. Pada sisi yang lain ketika verifikasi oleh pendamping PKH ditemukan biodata nama tersebut di masyarakat yang kondisinya sangat miskin, dan sangat layak sebagai penerima PKH, namun orang yang bersangkutan tidak terdaftar di data Kementerian Sosial, maka orang tersebut tidak berhak menerima bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

Sedangkan faktor pendukung adalah Komunikasi yang berjalan dengan baik antara pendamping dan peserta PKH. Komunikasi tersebut telah memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang merupakan syarat wajib bagi peserta PKH sebelum memperoleh hak menerima dana sebagai peserta PKH di rekeningnya. Dirasakan oleh peserta PKH dalam memanfaatkan dan memecahkan persoalan sehari-hari mereka.

Sumber daya yang memadai merupakan saran pendukung bagi peserta PKH. Ketika peserta PKH diberikan bantuan pengolahan dana bantuan dan penyuluhan pengembangan keahlian yang di sampaikan oleh pendamping PKH mendorong potensi keahlian peserta PKH ini bisa dikembangkan. PKH sudah memberikan manfaat bagi penerima untuk mengtaskan kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya teliti dengan Ibu Arief Insani, S. Kom., MT selaku BLT Kasi Perekonomian dikecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Senin 21 Juni 2021, mengatakan bahwa: “Hambatan yang ada dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan ini adalah pendataan jumlah masyarakat yang kurang mampu yang belum lengkap. Itu disebabkan banyaknya masyarakat yang tidak melaporkan data ketidak mampuan mereka kekecamatan sehingga menjadi kendala bagi kecamatan dalam pendataan penduduk yang kurang mampu sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan program bantuan ini malah tidak mendapatkan, serta masyarakat pun masih kurang memahami dengan bantuan Program Keluarga Harapan ini.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dinar Fitria Sari selaku pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya mengatakan bahwa; “Kendala yang menjadi hambatan pemerintah selama ini dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini adalah Pendataan Kependudukan Masyarakat Miskin yang menerima PKH (Program Keluarga Harapan).”

Sedangkan dari Pihak Dinas Sosial sendiri hambatan yang ditemukan dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah :

1. Masalah Closing Data Masyarakat Miskin
2. Verifikasi Data untuk Anak Sekolah
3. Kelengkapan Data Masyarakat yang Kurang lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga
4. Data yang kurang lengkap dari peserta anak yang menerima bantuan pendidikan dan kesehatan
5. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan PKH.

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Sariatun salah satu masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan ini

mengatakan bahwa: “Hambatan yang ada pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini adalah banyaknya warga disini yang tidak tahu akan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah sehingga kurangnya pemahaman masyarakat miskin terhadap adanya bantuan Program Keluarga Harapan ini sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan PKH ini menjadi tidak dapat merasakan manfaat dari bantuan PKH. Ini menyebabkan banyak masyarakat miskin yang tidak mengurus data kemiskinannya karena mereka mengira tidak ada bantuan dari pemerintah yang akan mensejahterakan mereka.”

Solusi Pemerintah Dalam Pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan)

Solusi yang dilakukan agar tidak terjadi hambatan dalam melaksanakan Program Dinas Sosial Melalui Keluarga Harapan ini adalah:

1. Pemerintah sendiri melalui BPS (Badan Pusat Statistik) untuk dapat melakukan pendataan kembali kepada masyarakat miskin agar bantuan Program Keluarga Harapan ini dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat miskin sehingga terciptalah kesejahteraan bagi masyarakat.
2. Masyarakat harus melengkapi data-datanya untuk menjadi peserta Program Keluarga Harapan sehingga masyarakat miskin dapat memperoleh bantuan dari Program Keluarga Harapan.
3. Pemerintah hendaknya menambah nilai bantuan dan jumlah penerimaan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan).
4. Masyarakat harus melakukan pendekatan dan pemahaman akan adanya program pemerintah dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH).

KESIMPULAN

Kehadiran dan peran Dinas Sosial melalui Program Keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya ternyata memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya berjalan sesuai dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin dengan memberi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat miskin. Setelah di teliti ternyata kesehatan dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan berpengaruh terhadap kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia apabila kondisi kesehatan dan pendidikan masyarakat rendah maka akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat oleh karena itu dengan adanya program Keluarga Harapan (PKH) masyarakat miskin di Kecamatan Sukolilo menjadi sangat terbantu.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengalami beberapa hambatan dalam penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH) diantaranya adalah pendapatan kependudukan masyarakat miskin yang tidak lengkap sehingga menjadi kendala bagi pihak PKH dalam meratakan pemberian penerima bantaun PKH, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program keluarga harapan.

Adapun solusi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan program keluarga harapan adalah pemerintah melalui BPS (Badan Pusat Statisti) melakukan pendataan ulang kepada masyarakat miskin agar

program bantuan ini dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat miskin sehingga terwujudlah kesejahteraan masyarakat yang tidak paham akan adanya program keluarga harapan.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan(PKH) Tahun 2019

Pemensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga harapan (PKH)

Dasril Arifin, Skripsi, 2013 :” Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Siak” Pekanbaru : UIN Sultan syarif Kasim

Parsudi Suparlan, 1995, Kemiskinan di Perkotaan, Jakarta : sinar harapan

Tim Penyusun PKH, 2019, Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan, Jakarta

Tim Penyusun PKH, 2019, Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan, Jakarta

Tim Penyusun PKH, 2019, Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Jakarta

Siti Djuwarijah. 2020. Komponen Makna Verba Memasak dalam Bahasa Sasak dalam Pengajaran bahasa. Jurnal Pembelajaran dan Pengajaran , Vol 1, No. 1

Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2020

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019

Nugroho, Heru.1995. Kemiskinan ketimpang dan Kesenjangan, Aditya Media, Yogyakarta.

Soekamto, Soerjono.2002.Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta.

Suryanto, Bagong. 1996. Perangkat Kemiskinan Problem Dan Strategi Pengetasannya Dalam Pembangunan Desa, Aditya Medika, Yoyakarta.

Suharto, Edi. 2007. kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik-Peran Pembangunan Sosial Dan Pekerjaan Sosial Dalam Mewujudkan Negara Sejahtera, Alfabeta, Bandung.

Sulastomo. 2008. Sistem Jaminan Sosial Nasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20210221/9/1358930/202_1-pemerintah-tekan-angka-kemisikinan-hingga-92-persen

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>

<https://ejournal.rbr.or.id/index.php/tamrinat/article/view/32>. Diakses pada 13 Oktober 2020